



**DR. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd**  
Bupati Luwu



**Syukur Bijak, SE**  
Wakil Bupati Luwu

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020

**TAHUN ANGGARAN 2021**

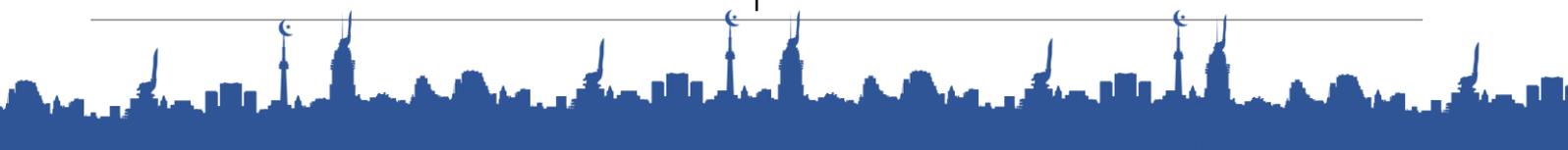
# KATA PENGANTAR

## **Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan mandiri Dalam Nuansa Religi maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu tahun 2020. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2020 sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana kegiatan.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 yang juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada pemerintah baik Pusat/Provinsi, Kabupaten/Kabupaten lain serta lebih penting lagi bagi pelaku – pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala/permasalahan yang dihadapi Kabupaten Luwu. Sehingga bagi Pemerintah Pusat atau Provinsi, dalam perumusan kebijakan strategis perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan Kabupaten Luwu, kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Sementara bagi Kabupaten/Kabupaten lain melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2020 ini, dapat dijadikan komparasi/pembandingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masing–masing. Sedangkan bagi pelaku–pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu, dapat mencermati kendala–kendala yang ada dalam penyelenggaraan program/kegiatan selama ini, mengetahui penyebab kegagalan suatu program/kegiatan dan merumuskan langkah– langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa–masa datang.



Dengan memanjatkan rasa syukur dan mohon ridho kepada Allah SWT, semoga segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu untuk Menuju Kabupaten Luwu lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya saing dapat tercapai.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Belopa, 17 Maret 2021

**BUPATI LUWU**



**H. BASMIN MATTAYANG**

## Daftar Isi

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1-2
B. Gambaran Umum .....	2
Kondisi Geografis .....	2-4
Kondisi Demografis .....	5
C. Kondisi Perekonomian .....	5-11
D. Kondisi Pemerintahan .....	11-15
E. Kondisi Pegawai Negeri Sipil .....	15-16
F. Sistematisasi Lakip .....	16-17

### BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

A. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2020 .....	34-37
1. Capaian Kinerja Misi 1 .....	37-45
2. Capaian Kinerja Misi 2 .....	45-50
3. Capaian Kinerja Misi 3 .....	50-59
4. Capaian Kinerja Misi 4 .....	59-67
5. Capaian Kinerja Misi 5 .....	67-69
6. Capaian Kinerja Misi 6 .....	69-72
7. Capaian Kinerja Misi 7 .....	73-75
8. Capaian Kinerja Misi 8 .....	75-78
9. Capaian Kinerja Misi 9 .....	78-85
10. Capaian Kinerja Misi 10 .....	85-90
B. Realisasi Anggaran .....	90-91
1. Pendapatan Asli Daerah .....	91-92
2. Belanja Daerah .....	92-93

### BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan .....	94-95
2. Langkah Perbaikan .....	95



## Ringkasan Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan. Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan guna mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dimana Laporan Kinerja Kabupaten Luwu tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan tahun 2020 di dalam RPJMD 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 34 Indikator Kinerja Kabupaten Luwu, pada tahun 2020 capaiannya secara umum sudah sangat baik, dimana terdapat 23 indikator atau 69,69% dengan kategori capaian "Sangat Tinggi", 4 indikator atau 12,12% dengan kategori "Tinggi", 0 indikator dengan kategori "Sedang", 0 Indikator berkategori "Rendah", 6 indikator atau sama dengan 18,19% dengan kategori "Sangat Rendah" dan ada 1 indikator yang belum dapat ditentukan capaian kinerjanya karena masih dalam proses "Review" oleh Kementrian PANRB RI. Capaian-capaian ini kemudian menjadi



salahsatu tolak ukur capaian Kepala Daerah selama periode masa jabatannya yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode lima tahun mendatang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 mendatang.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun setelah tahun anggaran berakhir menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **B. GAMBARAN UMUM**

### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota kabupaten adalah Kota Belopa. Ibukota Kabupaten Luwu sebelumnya adalah Kota Palopo namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu, maka Ibukota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sebagai pusat pemerintahan akibat hal tersebut maka wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah yang dipisahkan oleh wilayah Kota Palopo yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah perbatasan Kabupaten Luwu berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kota Palopo

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja utara dan Kabupaten Enrekang

Luas wilayah Kabupaten Luwu tercatat 3.000,25 km<sup>2</sup>, menurut ketinggian daerah sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu berada di ketinggian 100 m ke atas atau sekitar 64% sisanya sekitar 36% wilayah berada pada ketinggian 0-100 m. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Sebagaimana tertera pada tabel I sebagai berikut:

**Tabel I.1** Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1.	Larompong Selatan	9	1
2.	Larompong	12	1
3.	Suli Barat	7	1
4.	Suli	12	1
5.	Belopa	5	4
6.	Belopa Utara	6	2
7.	Bajo	11	1
8.	Bajo barat	9	-
9.	Latimojong	12	-
10.	Basse Sangtempe	12	-
11.	Basse Sangtempe Utara	12	-
12.	Kamanre	7	1
13.	Ponrang Selatan	12	1
14.	Ponrang	8	2
15.	Bua Ponrang	9	1
16.	Bua	14	1
17.	Walentrang	8	1
18.	Walentrang Utara	10	1
19.	Walentrang Timur	8	-
20.	Walentrang Barat	6	-
21.	Lamasi	9	1
22.	Lamasi Timur	9	-

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2021

Sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapa wilayah kecamatan yang belum memiliki wilayah administrasi kelurahan didalamnya. Adapun luas wilayah masing-masing seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2** Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2020

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	%
1	Larompong	Larompong	12	1	245,04	8,42
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	95,97	3,3
3	Suli	Suli	12	1	79,75	2,74
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	190,33	6,54
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	32,08	1,1
6	Kamanre	Cilallang	7	1	51,92	1,78
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	30,63	1,05
8	Bajo	Bajo	11	1	58,98	2,03
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	106,49	3,66
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	275,77	9,48
11	Latimojong	Kadundung	12	-	338,71	11,64
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	146,56	5,04
13	Bupon	Noling	9	1	157,97	5,43
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	110,11	3,79
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	97,09	3,34
16	Bua	Bua	14	1	177,39	6,1
17	Walentrang	Batusitanduk	8	1	43,12	1,48
18	Walentrang Timur	Tabah	8	-	66,89	2,3
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,47	1,46
20	Walentrang Utara	Bosso	10	1	243,58	8,37
21	Walentrang Barat	Ilan Batu	6	-	253,04	8,7
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	65,19	2,24
Jumlah			<b>207</b>	<b>20</b>	<b>2909,08</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2021

Tabel diatas menggambarkan luas wilayah masing-masing kecamatan, dimana Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan luas 338,71 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,64% dari luas seluruh Kabupaten Luwu, menyusul Kecamatan Bastem dan Walentrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 275,77 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 30,63 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 1,05% dari luas Kabupaten Luwu.

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2020 adalah sebesar 365.608 jiwa yang terdiri dari 184.162 jiwa Laki-Laki dan 181.446 Perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2020 sebesar 0,92%. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu yang terus bertambah setiap tahunnya tersebar di berbagai kecamatan dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 32.810-8,97% dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Bastem 5.778-1,58%

Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, Kecamatan Belop Utara merupakan daerah terpadat yaitu 602 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya 1,05% dari luas Kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya terdapat di Kecamatan Latimojong yaitu hanya 17 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 11,64% dari luas Kabupaten Luwu.

## C. KONDISI PEREKONOMIAN

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Sasaran pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan proses jangka panjang dari suatu pemerintahan dengan sasaran utama proses tersebut adalah bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Meskipun Kabupaten Luwu yang sekarang adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo namun potensi perekonomiannya masih cukup tinggi. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 mencapai 15,66 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,22 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 14,44 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi di beberapa lapangan usaha (inflasi). Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 9,16 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,73 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6.26 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni

disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

**Tabel I.3** PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.046,08	4.267,80	4.565,06	4.747,14	4 762,22
B	Pertambangan dan Penggalian	184,04	200,41	212,83	227,42	231,82
C	Industri Pengolahan	359,81	387,11	414,03	457,47	426,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,07	10,67	11,47	11,93	12,60
E	Pengadaan Air	1,30	1,41	1,50	1,56	1,68
F	Konstruksi	676,59	712,78	756,96	823,64	839,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor	943,16	999,37	1.080,04	1.173,45	1 166,66
H	Transportasi dan Pergudangan	61,94	65,73	74,81	81,81	73,77
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	58,20	61,63	68,40	72,56	69,70
J	Informasi dan Komunikasi	237,43	258,05	281,68	309,75	349,74
K	Jasa Keuangan	120,24	126,83	130,80	136,65	144,48
L	Real Estate	484,98	517,08	541,09	572,49	144,48
M,N	Jasa Perusahaan	1,95	2,19	2,37	2,56	2,45

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	372,23	389,60	398,37	446,86	446,08
P	Jasa Pendidikan	279,76	302,25	329,74	354,86	380,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,39	240,35	258,38	278,88	313,27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	22,19	24,62	27,64	29,93	28,88
<b>PDRB Luwu</b>		<b>8.023,37</b>	<b>8.567,87</b>	<b>9.155,16</b>	<b>9.728,96</b>	9 855,91

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2021

## 2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah meskipun belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil. Berdasarkan perhitungan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sebesar Rp29.589 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya terus meningkat menjadi Rp33.573 miliar pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar Rp36.603 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp40.200 miliar, dan pada tahun 2019 mencapai Rp43.250 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,78 persen pertahun.

Untuk PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan meskipun pertumbuhan lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku namun dari tahun 2015-2017 juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,38 persen per tahun. PDRB Perkapita Kabupaten dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel I.4** PDRB Perkapitan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
2015	29.589,00	13,88	21.237,00	6,31
2016	33.573,00	13,46	22.711,00	6,94
2017	36.603,00	9,03	24.046,00	5,88
2018	40.200,00	9,83		
2019	43.250,00	7,59		
2020	15.660,00	1,3	9.730,00	6,26

Sumber : BPS Kab. Luwu

## 3. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 46,18 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 50,58 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2020 mencapai 46,04 ribu jiwa

atau 12,76% dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu, Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Gambar 1.1.** Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2020

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kepulauan Selayar</b>	17,21	17,62	17,59	17,36	17,04
<b>Bulukumba</b>	33,25	33,10	31,25	30,49	30,00
<b>Bantaeng</b>	17,53	17,91	17,20	16,91	16,84
<b>Jeneponto</b>	55,32	55,35	55,95	54,05	53,24
<b>Takalar</b>	27,05	26,99	26,57	25,93	25,38
<b>Gowa</b>	61,52	62,77	59,34	57,99	57,68
<b>Sinjai</b>	22,51	22,25	22,48	22,27	22,06
<b>Maros</b>	39,02	38,50	35,97	34,85	34,62
<b>Pangkep</b>	52,86	53,38	50,12	47,07	47,12
<b>Barru</b>	61,24	16,76	15,68	14,92	14,44
<b>Bone</b>	75,09	77,13	79,57	76,25	81,33
<b>Soppeng</b>	19,12	18,76	17,00	16,45	17,23
<b>Wajo</b>	29,46	27,69	29,19	29,73	27,48
<b>Sidrap</b>	15,92	15,72	15,41	14,44	15,36
<b>Pinrang</b>	31,28	31,43	32,94	31,85	33,56
<b>Enrekang</b>	26,98	26,71	25,53	25,40	25,25
<b>Luwu</b>	50,58	49,80	47,91	46,18	46,04
<b>Tana Toraja</b>	28,42	29,18	29,65	26,87	28,41
<b>Luwu Utara</b>	43,75	44,04	42,43	42,48	42,20
<b>Luwu Timur</b>	21,08	21,94	21,15	20,83	20,82
<b>Toraja Utara</b>	33,02	32,85	30,68	28,64	27,88
<b>Makassar</b>	66,78	68,19	66,22	65,12	69,98
<b>Pare-Pare</b>	8,02	8,07	8,01	7,62	7,96
<b>Palopo</b>	15,02	15,44	14,27	14,37	14,71
<b>Sulawesi selatan</b>	<b>807,03</b>	<b>813,07</b>	<b>792,64</b>	<b>767,80</b>	<b>776,83</b>

Sumber Data : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

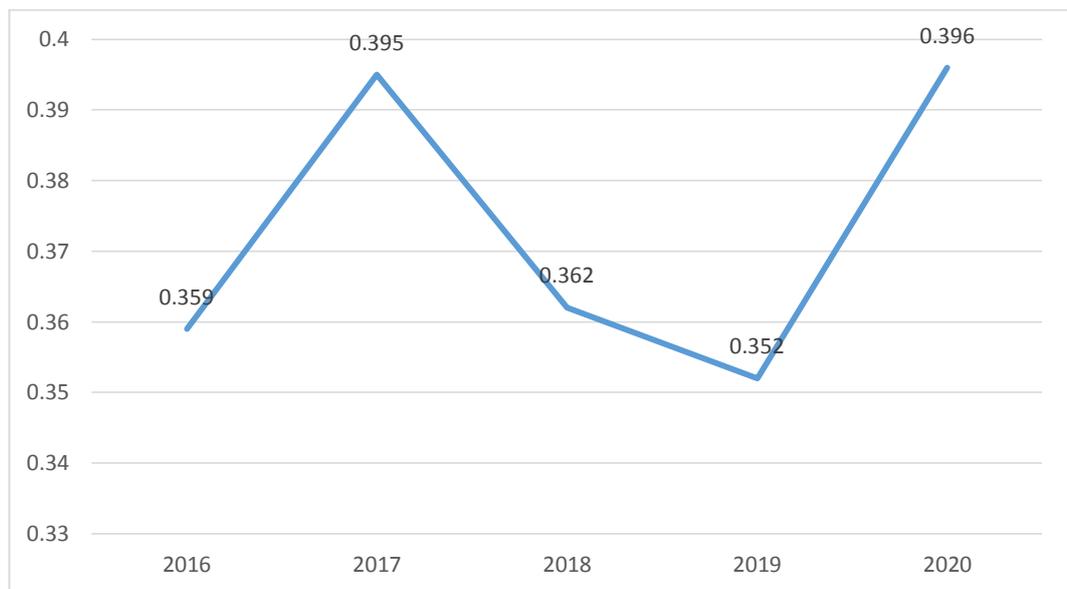
#### 4. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan alat ukur dalam menentukan seberapa besar ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah pada periode tertentu. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, maka semakin besar nilai rasio Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran dalam suatu wilayah. Skala indeks gini rasio terdiri dari:

- ✓ Ketimpangan rendah bila gini ratio  $\leq 0,30$
- ✓ Ketimpangan sedang bila gini ratio antara 0,30 hingga 0,50
- ✓ Ketimpangan tinggi bila gini ratio  $\geq 0,50$

Berdasarkan skala gini ratio, maka gini ratio Kabupaten Luwu selama tahun 2015-2019 berada pada angka  $\geq 0,30$  dan lebih  $\leq 0,50$  sehingga mengindikasikan ketimpangan pendapatan tergolong skala sedang.

**Gambar 1.2.** Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Luwu

#### D. KONDISI PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Susuna Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perumahan dan Permukiman
7. Dinas Sosial
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas PUPR
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Dinas Pertanahan
22. Dinas Perdagangan
23. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
24. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
26. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
27. Dinas Satpol PP
28. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
29. Badan Pengelola Keuangan Daerah



30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
32. Badan Pendapatan Daerah
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Inspektorat
35. RSUD Batara Guru
36. Kecamatan-Kecamatan

**Tabel I.5** Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1.	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2.	Kesehatan	Pengelolaan UKP & UKM dan Rujukaan Tingkat kabupaten
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten & Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Imprastruktur pada Permukiman di Daerah
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan gangguan & Ketertiban Umum Penanganan PERDA & PERBUB
6.	Sosial	
NO.	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1.	Tenaga Kerja	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3.	Pangan	
4.	Pertanahan	
5.	Lingkungan Hidup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk. 2. Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi & edukasi (KIE) pengendalian Penduduk KB kearifan Budaya lokal
9.	Perhubungan	1. Penetapan rencana induk LLAJ 2. Penerbitan Izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas daerah 3. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan Helikopter
10.	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12.	Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan & Pengembangan Organisasi Kepemudaan & Keolahragaan
14.	Statistik	Penyelenggaraan statistik sektoral
15.	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah
16.	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi & pembinaan lembaga adat
17.	Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan &

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
		Pembudayaan gemar membaca
18.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip
NO.	URUSAN PILIHAN	KETERANGAN
1.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan & penyelenggaraan TPI & pemberdayaan nelayan kecil
2.	Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategi pariwisata & destinasi pariwisata
3.	Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana & pengembangan sarana pertanian
4.	Perdagangan	Pembangunan & pengelolaan sarana distribusi perdagangan
6.	Perindustrian	Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
7.	Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah

## E. KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian atau "SIMPEG" Tahun 2020 sebanyak 5.735 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.169 orang dan perempuan sebanyak 3.566 orang.

**Tabel I.6** Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2020

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD/Sederajat	5	0	5

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2.	SLTP/Sederajat	16	2	18
3.	SLTA/Sederajat	396	241	637
4.	Diploma I	4	15	19
5.	Diploma II	33	56	89
6.	Diploma III	71	403	474
7.	Diploma IV	18	95	113
8.	Strata I	1411	2588	3999
9.	Strata II	214	166	380
10.	Strata III	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>2169</b>	<b>3566</b>	<b>5735</b>

## F. SISTIMATIKA LAKIP

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana kinerja (*Performance Plan*) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2020 sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

**a. Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

**b. Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja**

Pada sub bab ini disajikan Evaluasi dan analisis dari kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis serta indicator sasaran

**c. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu**

Pada sub bab ini disajikan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

**Bab IV Penutup**

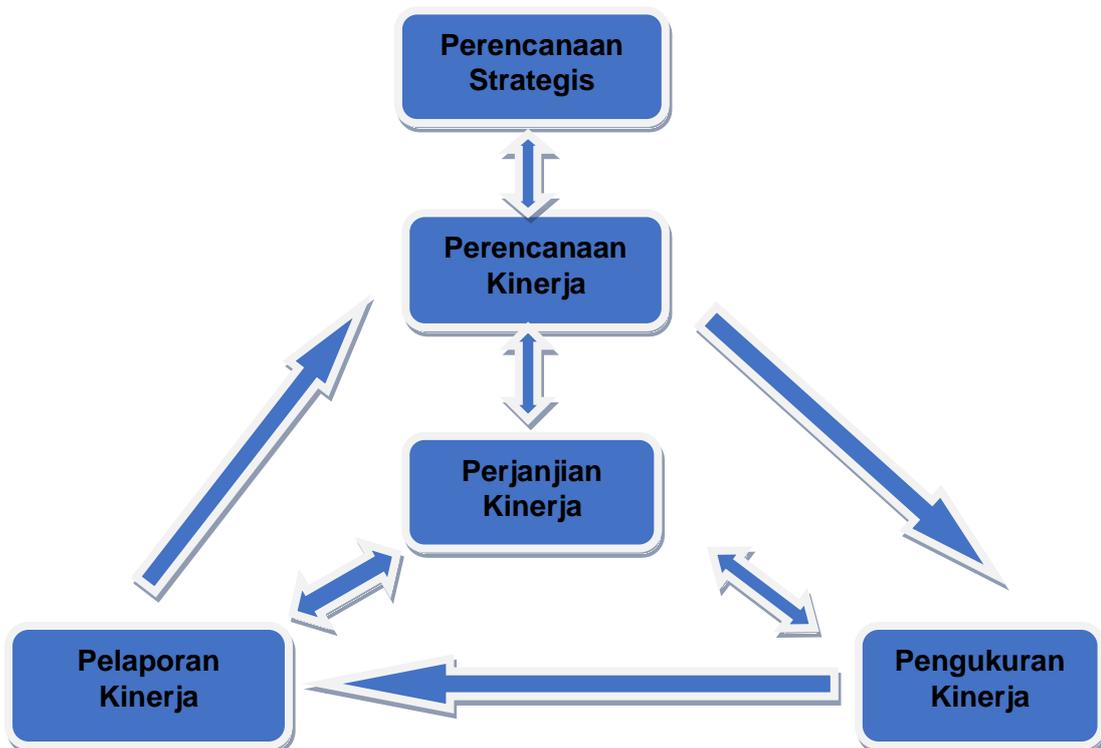
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.



Gambar 2.1 Hubungan Antara Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja

Sesuai skema di atas, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024. Pengukuran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024. LKjIP tahun 2019 ini disusun

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019 – 2024 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Luwu dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan good and clean governance, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Luwu adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-2 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel. 2.2

## Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sesuai RPJMD Periode 2019-2024

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2020
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	<b>T1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih</b>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	Cukup
		S1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	2. Nilai SAKIP	CC	CC
		S1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
		S1.3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	<b>T2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	5. Indeks Pembangunan Manusia	69,37	70,40
		S2.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	6. Indeks Pendidikan	63,19	67,05
		S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	7. Indeks Kesehatan	76,31	76,55
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<b>T3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan</b>	8. Indeks Kepuasan Layanan Infrastrukturu	n.a	Cukup



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2020
		S3.1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas Wilayah	9. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	21,84	23,87
		S3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	10. Persentase penduduk berakses air minum	82,04	84,09
			11. Rasio jaringan irigasi	59,94	63,00
		S3.3. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	12. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	75,45	76,00
4	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	<b>T4. Meningkatnya perekonomian daerah</b>	13. Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,21	7,30
		S4.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat	14. PDRB Perkapita (Juta Rp.)	36,60	38,03
			15. Indeks Gini	0,362	0,360
		S4.2. Mengembangkan destinasi wisata daerah	16. Jumlah obyek wisata unggulan yang di kembangkan	0	1



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2020
		S4.3. Menurunnya jumlah pengangguran	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,47	4,36
5	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	<b>T5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat</b>	18. Skor Pola Pangan Harapan	9	9
		S5. 1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis agribisnis	19. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	7,04	7,04
6	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	<b>T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius</b>	20. Angka Kriminalitas per 10.000	4,00	3,20
		S6.1. Meningkatnya Upaya Penyerbarluasan Ajaran Agama	21. Jumlah kader mubaligh muda (orang)	0	40
			22. Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	44,48	27,50
7	Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>T7. Meningkatkan kemandirian Desa</b>	23. Persentase desa berstatus Mandiri	0	40,00
		S7.1. Berkembangnya perekonomian Desa	24. Jumlah BUMdes berprestasi (Maji dan Mandiri)	0	0



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2020
8	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	<b>T8. Meningkatkan nilai investasi</b>	25. Nilai Investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	16,69	17,11
		S8.1. Meningkatnya realisasi investasi	26. Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	13	13
			27. Persentase wirausaha muda	0,50	1,00
9	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik	<b>T9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum</b>	28. Cakupan penegakan dan perlindungan hukum (%)	n.a	100,00
		S9.1. Meningkatnya produk hukum daerah	29. Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	n.a	80,00
			S9.2. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	30. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100,00
		S9.3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	31. Indeks Pemberdayaan Gender	61,61	61,90
10	Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	<b>T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>	32. Indeks kualitas lingkungan hidup	Na	Cukup
		S10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	33. Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	39,22	50,00



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2020
		S10.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	34. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Na	30,00

## PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas)
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan (Prioritas) Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas)
		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas)
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas)
		Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
		Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur
		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas)		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)		
Program Pengelolaan Budaya Daerah (Prioritas)		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas)
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)
		Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)



		Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas)
	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)
	Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas)
		Program Pengembangan Perumahan (Prioritas)
		Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas)
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas)
		Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Mengembangkan destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas)
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas)
	Menurunnya jumlah pengangguran	Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Prioritas)		
Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan (Prioritas)
		Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas)
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunnya kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)
		Program Peningkatan Kapasitas Legislasi (Prioritas)



Meningkatkan kemandirian Desa	Berkembangnya kemandirian desa	Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas)
		Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)
Meningkatkan nilai investas	Meningkatnya realisasi investasi	Program Penyelenggaraan E-Government (Prioritas)
		Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas)
Meningkatnya produk hukum daerah	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Prioritas)
		Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Prioritas)
	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)
	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)
	Meningkatnya kualitas menejemen pengelolaan bencana	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas)
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas)
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing–masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode berkenaan berjalan.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan yang berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 sebagai fokus utama kepala daerah dalam membangun daerahnya. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi. Guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu.

Demi mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan mengklasifikasikan kategori capaian, dimana interval dan kriteria realisasi kinerja merujuk pada skala

nilai peringkat kinerja pada Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Rentang capaian terhadap kategori capaian disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

#### A. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2020

Indikator Kinerja Sasaran yang akan dikinerjakan adalah indikator masing-masing sasaran untuk setiap misi yang ada dalam dokumen RPJMD. Indikator sasaran tersebut berupa *Outcome* dan penting yang juga sekaligus merupakan indikator kinerja utama perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran-sasaran turunan dari misi yang tertuang didalam dokumen RPJMD 2019-2024. Secara ringkas capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun sebelumnya yaitu 2020 disajikan pada table berikut:

Tabel 3.2

#### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Periode RPJMD 2019-2024

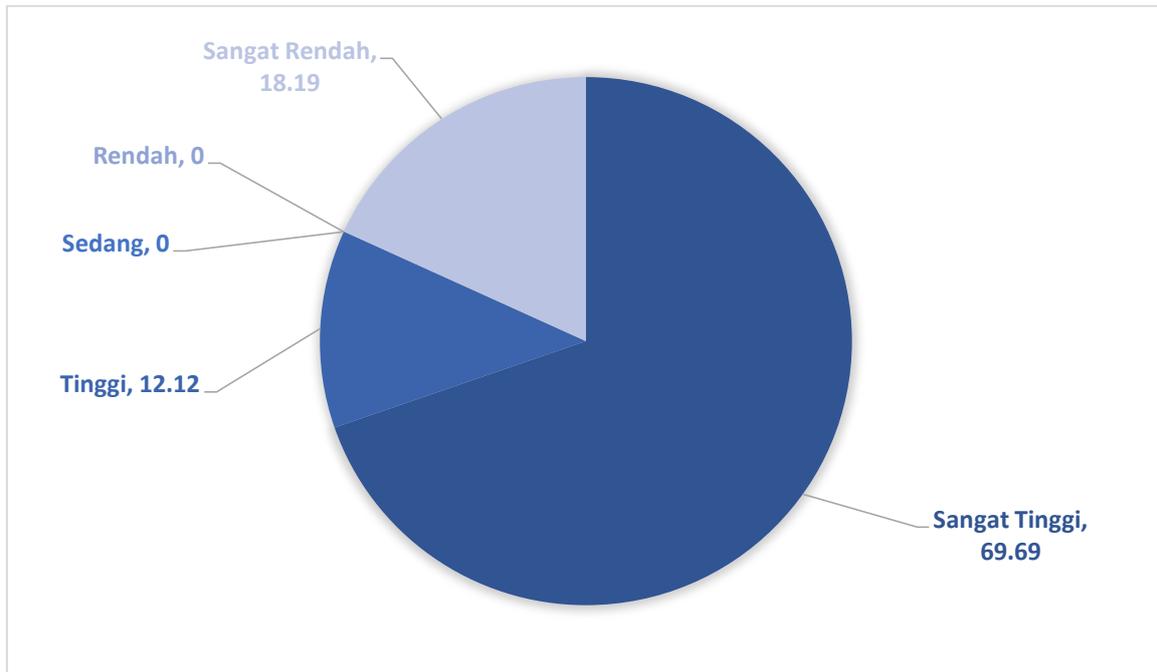
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Akhir Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kat	100,00	Baik	On Review	-	-
2	Kategori SAKIP Kabupaten	Kat	100,00	CC	CC	100	Sangat

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Akhir Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
							Tinggi
3	Opini Pemeriksa Laporan Keuangan	Kat	100,00	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kat	100,00	Baik	Baik	100	Sangat Tinggi
5	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Skor	101,47	70,40	70,39	99,98	Sangat Tinggi
6	Indeks Pendidikan	Skor	100,00	63,72	64,17	100,7	Sangat Tinggi
7	Indeks Kesehatan	Skor	100,00	76,55	77,22	100,87	Sangat Tinggi
8	<b>Indeks Layanan Infrastruktur</b>	Kat	100,00	Cukup	Cukup	100	Sangat Tinggi
9	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	97,48	23,87	23,93	100,2	Sangat Tinggi
10	Persentase penduduk berakses air minum	%	98,29	84,09	80,78	96,06	Sangat Tinggi
11	Rasio jaringan irigasi	%	113,28	63,00	64,98	103,14	Sangat Tinggi
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	100,00	76,00	76,00	100	Sangat Tinggi
13	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	Angka	86,82	7,21	6,26	86,82	Tinggi
14	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Angka	73,42	38,03	43,96	115,6	Sangat Tinggi
15	Indeks Gini	Angka	97,24	0,360	0,352	102,2	Sangat Tinggi
16	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Objek	0	1	0	0	Sangat Rendah
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	95,92	4,38	4,94	87,21	Tinggi
18	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	Angka	100,00	9	86,3	958,9	Sangat Tinggi
19	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	78,97	7,20	0,32	4,4	Sangat Rendah
20	<b>Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk</b>	Angka	100,00	3,20	3,20	100	Sangat Tinggi
21	Jumlah Kader Muballigh	Orang	0	40	0	0	Sangat Rendah
22	Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	%	100,00	27,50	0	100	Sangat Rendah
23	<b>Persentase Desa Berstatus Mandiri</b>	%	100,00	0	0	100	Sangat Tinggi
24	Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	Unit	0	0	0	0	Sangat Rendah
25	<b>Nilai investasi PMA dan PMDN</b>	Miliar Rp.	100,00	17,11	35,76	208,64	Sangat Tinggi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Akhir Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
26	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi	Perusahaan	100,00	13	16	123,1	Sangat Tinggi
27	Persentase Wirausaha Muda	%	100,00	1,00	0,28	28	Sangat Rendah
28	<b>Cakupan Penegakan dan Perlindungan Hukum</b>	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
29	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah	%	100	80,00	80	100	Sangat Tinggi
30	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
31	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	104,37	61,90	55,89	90,29	Tinggi
32	<b>Indeks kualitas lingkungan hidup</b>	Kat	100	Cukup	Cukup	100	Sangat Tinggi
33	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	%	91,79	50,00	45,00	90,00	Tinggi
34	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Angka	100,00	30,00	30,00	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 34 Indikator Kinerja Kabupaten Luwu, pada tahun 2020 capaiannya secara umum sudah sangat baik, dimana terdapat 23 indikator atau 69,69% dengan kategori capaian “Sangat Tinggi”, 4 indikator atau 12,12% dengan kategori “Tinggi”, 0 indikator dengan kategori “Sedang”, 0 Indikator berkategori “Rendah”, 6 indikator atau sama dengan 18,19% dengan kategori “Sangat Rendah” dan ada 1 indikator yang belum dapat ditentukan capaian kinerjanya karena masih dalam proses “Review” oleh Kementrian PANRB RI. Berdasarkan kategori capaiannya tersebut Kategori Capaian Kinerja IKU Kabupaten Luwu Tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1  
Diagram Capaian Kinerja IKU Tahun 2020



Indikator-indikator yang diukur merupakan turunan dari sasaran setiap misi kepala daerah yang termuat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Adapun Pencapaian masing-masing indikator tersebut kemudian diuraikan berdasarkan sasaran dari tiap-tiap misi sehingga sekaligus menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah selama periode jabatannya. Berikutnya capaian kinerja indikator utama Tahun 2020 periode RPJMD 2019-2024 dijabarkan masing masing berdasarkan misi dan sasaran masing masing.

### 1. Capaian Kinerja Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Berwibawah, Amanah, Transparan dan Akuntabel

Dalam rangka mewujudkan misi pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Sasaran yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1.1 Sasaran I: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

##### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” pada misi “Mewujudkan pemerintahan yang

Profesional, Berwibawah, Amanah, Transparan dan Akuntabel” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

**Capaian Kinerja Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja  
Pemerintah Daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Kategori	CC	CC	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>

Dari indikator di atas dapat dipahami bahwa Nilai SAKIP yang menjadi Indikator tercapainya sasaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memperoleh Nilai 51,78 dengan predikat “CC” sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran ini masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang capaian Lebih dari 91 % sampai dengan 100%.

Tabel 3.4

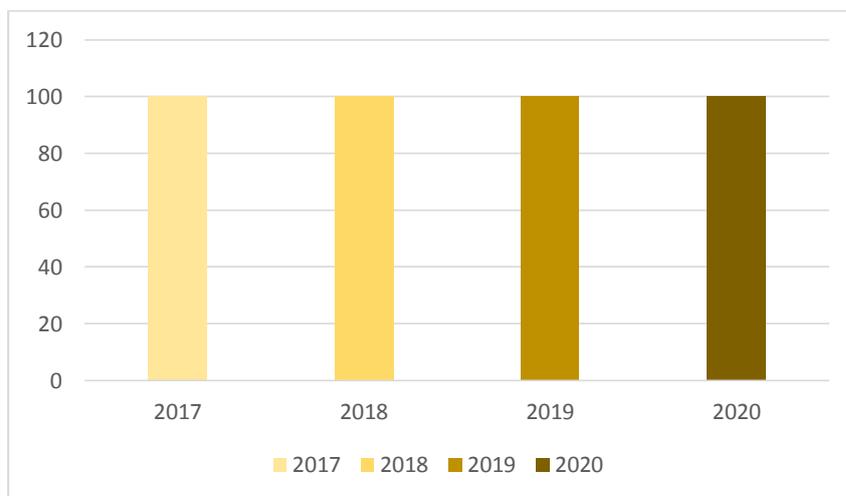
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran I tahun 2019 dengan  
beberapa tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Nilai SAKIP	100	100	100	100

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan tiga tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini dapat dipertahankan secara konsisten sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Gambar 3.2

**Grafik capaian kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” beberapa tahun terakhir**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Predikat SAKIP terealisasi dengan Predikat Kategori CC dan sesuai target pada tahun 2020 yaitu CC, Namun mengingat capaian SAKIP tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang saling berkaitan. Perlu adanya langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Luwu untuk mencapai predikat SAKIP yang lebih tinggi ditahun berikutnya. Tercapainya realisasi target dari kinerja memang sesuatu yang memuaskan dari aspek target dan realisasi. Namun dari aspek kinerja predikat “CC” masih merupakan predikat yang jauh dari harapan, oleh sebab itu ada beberapa hal yang dinilai masih perlu di benahi. Seperti masih rendahnya kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Luwu, dimana secara umum hal ini merupakan imbas dari minimnya kapasitas dan kapabilitas ASN dalam tahapan penyusunan hingga penyajian dokumen. Selain itu terdapat banyak kendala internal perangkat daerah dalam merealisasikan target yang direncanakan mengingat pemanfaatan data-data belum dilakukan secara komprehensif .

Untuk meningkatkan Kategori SAKIP indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah dengan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil secara terpadu, konsisten dan menyeluruh.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini adalah sebanyak 4 program yaitu: Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah, dan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

## 1.2 Sasaran II: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

- a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” pada misi “Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Berwibawah, Amanah, Transparan dan Akuntabel” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3.5*  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>

Dari indikator kinerja diatas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah kabupaten luwu telah mencapai target spengelolaan keuangan daerah

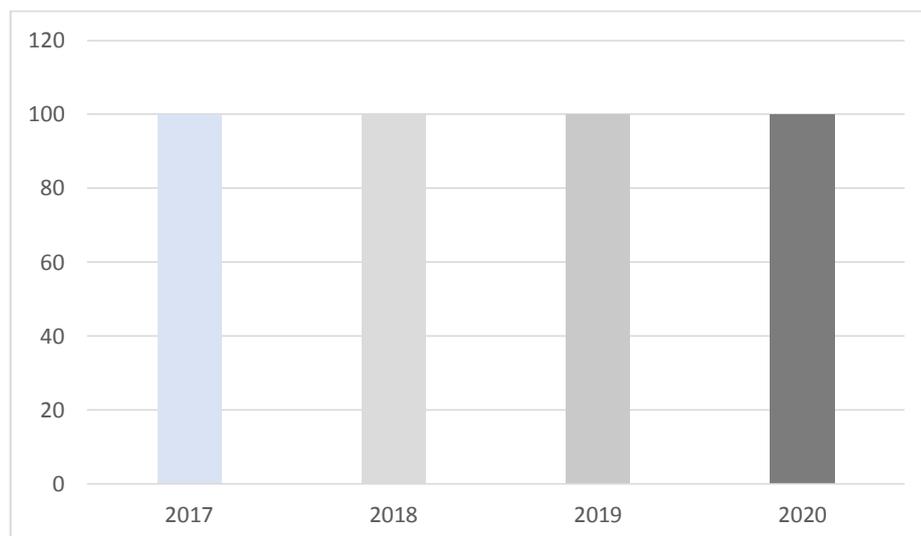
dengan kualitas sangat baik. Sebagaimana capaian dari realisasi targetnya adalah 100% dengan kategori “sangat Tinggi”.

*Tabel 3.6*  
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran II tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	100

Meninjau capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ini mampu mempertahankan capaiannya selama beberapa tahun kebelakang, sebagaimana yang dapat disajikan pada grafik berikut:

*Gambar 3.3*  
**Grafik capaian kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Opini Laporan Keuangan;

Indikator Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 mampu diraih dengan opini WTP sesuai target WTP. Dimana Acuan untuk pemberian opini WTP selain kepatuhan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian SAP dan Internal Control, juga disebabkan karena beberapa hal, yakni:

- 1 Adanya kepercayaan publik, transparansi, dan regulasi yang sehat dimana untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah;
- 2 Pemerintah mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan; dan
- 3 Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Untuk mempertahankan indikator tersebut diatas maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah Upaya Peningkatan Komitmen dari setiap unsur pelaksana bahwa upaya perbaikan pengelolaan keuangan tidak hanya dengan semangat tapi juga dengan dukungan dana yang besar, sumber daya manusia yang profesional dan yang paling penting adalah itikad untuk melaksanakan perbaikan secara kaffah.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas ini adalah sebanyak 3 program, yaitu: Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Anggaran, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah;

### 1.3 Sasaran III Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

#### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik” pada misi “Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Berwibawah, Amanah, Transparan dan Akuntabel” dapat dijabarkan sebagaimana tabel:

Tabel 3.7

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					

Dari indikator kinerja dapat dipahami bahwa pemerintah daerah kabupaten luwu mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dengan kategori “sangat tinggi”. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Di tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang melaksanakan survey IKM sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 yaitu RSUD Batara Guru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal

dan PTSP. Sebagaimana hasil Laporan kinerja dari ke tiga Perangkat Daerah tersebut mencapai kinerja sesuai target yaitu “Baik”.

Tabel 3.8

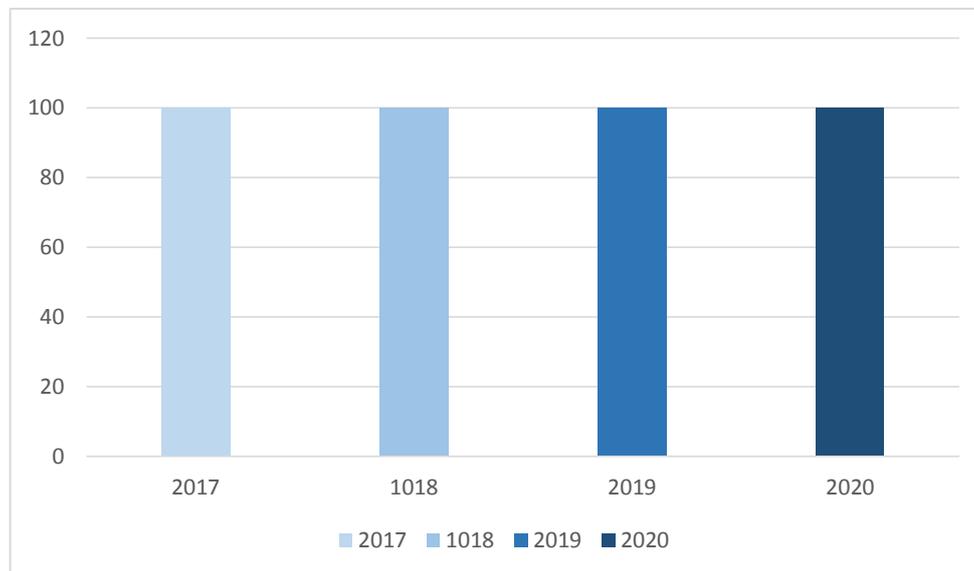
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran III tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	100	100

Sebagaimana penyajian tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dicapai dengan baik dan secara konsisten mempertahankan capaian kinerja, sebagaimana yang disajikan pada grafik berikut ini:

Gambar 3.4

**Grafik capaian kinerja Sasaran 3 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik”**



U. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat. Tercapainya kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya tidak

terlepas dari partisipasi masyarakat. Karena masyarakat merupakan objek dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah harus Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhannya. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam hal ini beberapa perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan public secara langsung kepada masyarakat, menyediakan berupa kuisisioner (secara kualitatif/kuantitatif) untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atau penerima layanan.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah sebanyak 3 program yaitu: (1) Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN, (2) Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur, dan (3) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur.

## **2. Capaian Kinerja Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat**

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 Sasaran yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### **2.1 Sasaran I: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat**

- a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” dapat dijabarkan sebagaimana tabel:

Tabel 3.9

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	63,72	64,17	100,7
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100,7</b>

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa kabupaten luwu telah mencapai sasaran strategis peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100,7%. Bahwa dari data tersebut dapat dipahami bahwa pencapaian kabupaten luwu melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Indikator Kinerja Utama. Sehingga capaian kinerja kabupaten luwu pada dokumen LKjIP mencapai kategori “Sangat Tinggi” karena melebihi rentang nilai dari 91% sampai dengan 100%.

Tabel 3.10

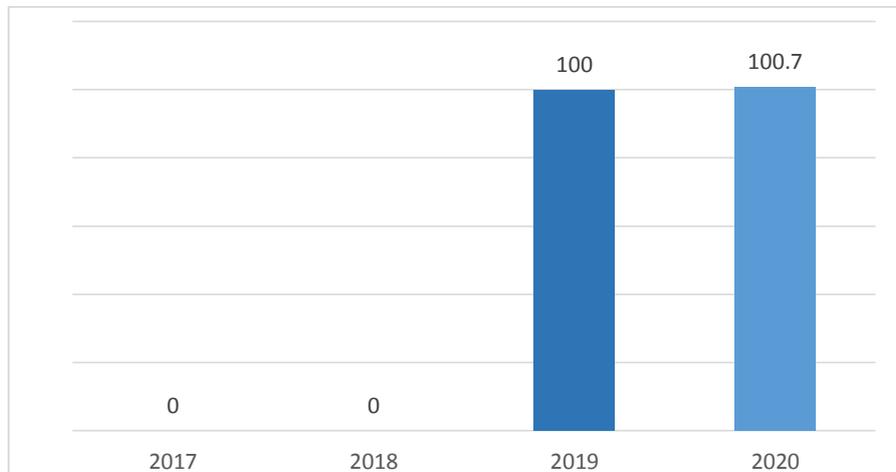
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran I tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pendidikan	-	-	100	100,7

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat secara umum berjalan dengan baik. Karena dilihat dari presentasi capaian kinerjanya pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan dan bahkan di tahun 2020 capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya pada Indikator Kinerja Utama, untuk lebih mudah memahami maka disajikan gambar berikut ini:

Gambar 3.5

**Grafik capaian kinerja Sasaran I “Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator yaitu lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Di wilayah Kabupaten Luwu capaian angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan tiap tahunnya yang tentunya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang sudah semakin membaik seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan upaya pemerintah dalam menuntaskan pendidikan wajib dasar bagi masyarakatnya dalam upayanya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat ini adalah sebanyak 3 program, yaitu: Program Pengembangan Pendidikan Non-Formal, Program Pembinaan Sekolah Dasar, Program

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Pengelolaan Budaya Daerah.

## 2.2 Sasaran II: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” Dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.11

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	76,55	77,22	100,87
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100,87</b>

Dari indikator kinerja pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah kabupaten luwu mampu mencapai realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya pada Indikator Kinerja Utama. Dibandingkan dengan target kinerja, indek Kesehatan kabupaten luwu lebih 0,67% dari target yang ditetapkan. Sehingga capaian realisasi kinerjanya sebesar 100,87%, dan masuk sebagai kategori capaian “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang 91% sampai dengan 100%.

Tabel 3.12

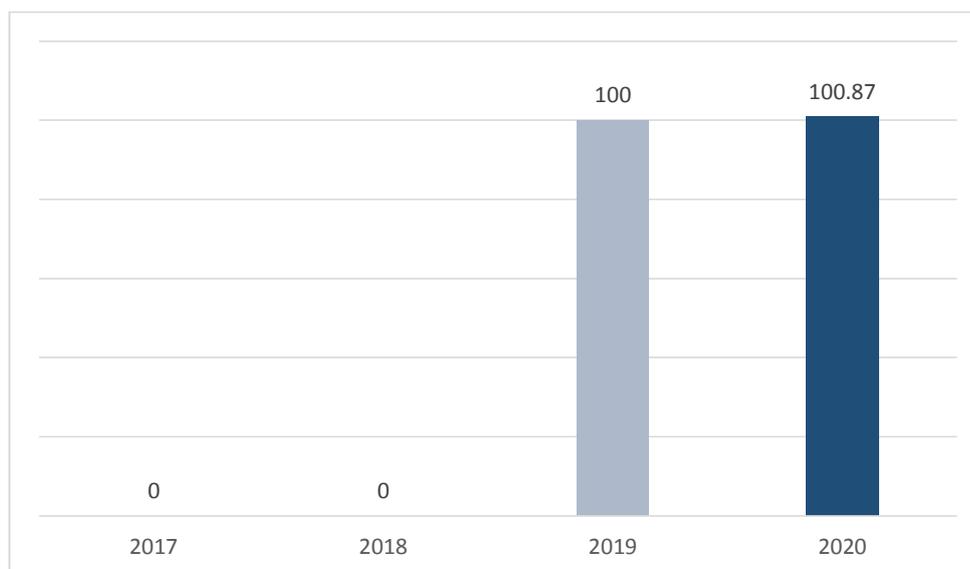
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran II tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kesehatan	-	-	100	100,87

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Sasaran kinerja untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat cenderung meningkat, capaian kinerja di tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Kemudian untuk tahun 2017 dan 2018, capaian sasaran kinerja tersebut belum bisa dideteksi dikarenakan pada tahun 2019 merupakan tahun transisi dari dokumen perencanaan (RPJMD) Kabupaten Luwu, sehingga sasaran kinerja dan indikator kinerja indeks Kesehatan baru ditetapkan di 2019 dan pada 2017 dan 2018 belum ditetapkan, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.6

**Grafik capaian kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yaitu: Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diperoleh dari Angka Harapan Hidup (AHH). Besar kecilnya Angka Harapan Hidup (AHH) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kualitas lingkungan
2. Kualitas prilaku/pola hidup
3. Kualitas pelayanan kesehatan

Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan indikator tersebut melalui peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, prilaku/pola hidup dan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lansia, pencegahan terhadap penyakit, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung lansia.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ini adalah sebanyak 2 program dan 28 Kegiatan yaitu: Program Upaya Kesehatan 14 kegiatan dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14 kegiatan;

### **3. Capaian Kinerja Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan**

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Sasaran yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **3.1 Sasaran I: Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah**

- a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3.13

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	23,87	23,93	100,2
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100,2</b>

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah berjalan dengan baik, sebagaimana dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja sebesar 100,2% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.14

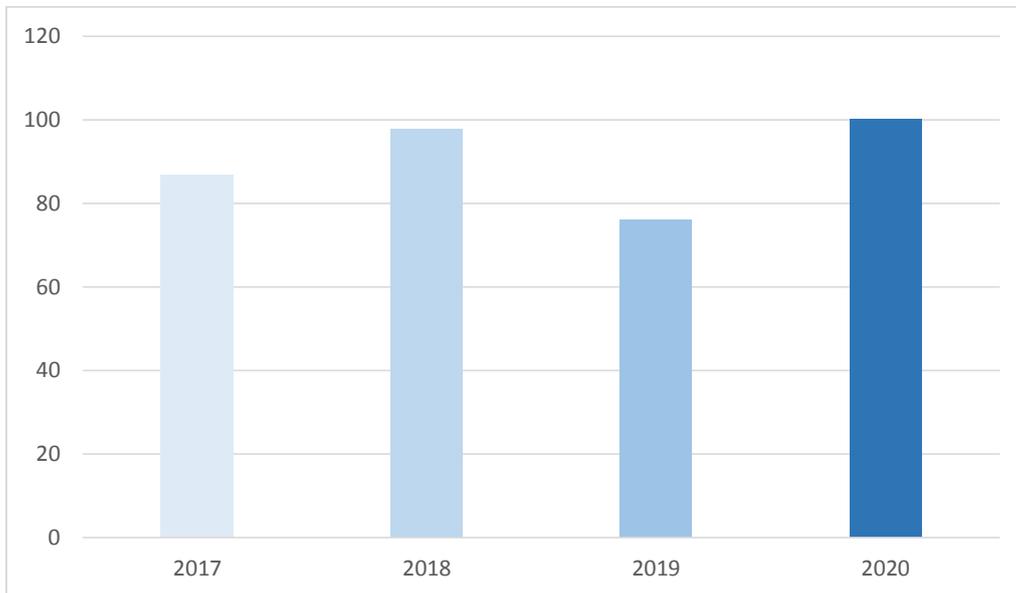
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	86,83	97,76	76,01	100,2

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap cenderung mengalami peningkatan di dua tahun terakhir yaitu 2017-2018 dan sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Namun, di tahun 2020 pemerintah kabupaten luwu mencoba untuk merealisasikan kinerja dengan maksimal sehingga mengalami kenaikan yang signifikan, seperti yang disajikan dalam gambar berikut dibawah ini:

Gambar 3.7

**Grafik capaian kinerja Sasaran  
“Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap;

Indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sempat mengalami penurunan di tahun 2019 karena mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Adanya penambahan jalan baru/pembentukan yang tidak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan, menurut aturan jumlah Panjang jalan harus sesuai Panjang jalan yang ada di SK Bupati Nomor 379/X/2015 tentang penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu.
2. Mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik yang disebabkan bahan yang dipergunakan tidak baik atau diluar ketentuan teknis. Hal ini yang sering kali menjadi faktor pendukung terjadinya kerusakan lebih cepat.

3. Rendahnya kualitas pengawasan pada pelaksanaan proyek tersebut yang berakibat pada hasil/kualitas pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Air yang mengalir di badan jalan/tidak ada saluran, karena menurut pengalaman, jalan yang sistem pelimpasan buruk akan semakin cepat rusak jalan tersebut. Bisa juga karena air yang menggenang di jalan.
5. Perencanaan yang kurang tepat, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.

Sehingga untuk meningkatkan indikator tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menangani permasalahan tersebut, bahwa pembangunan jalan aspal yang baik harus dimulai pada proses perencanaan, pembangunan sampai dengan pemeliharaan agar tercipta jalan dengan kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK) dan Kegiatan Peningkatan Jalan (DID).

### **3.2 Sasaran II: Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar**

- a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan  
Infrastruktur Dasar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Presentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,09	80,78	96,06
	Rasio Jaringan Irigasi	%	63,00	64,98	103,14
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>99,60</b>

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar berjalan dengan baik. Meskipun pada indikator presentase penduduk berakses air bersih tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama, tetapi pada Indikator Rasio Jaringan Irigasi mengalami pencapaian yang signifikan, karena melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun, secara umum capaian kinerja dari sasaran peningkatan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar memperoleh rata-rata 99,60% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.16

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

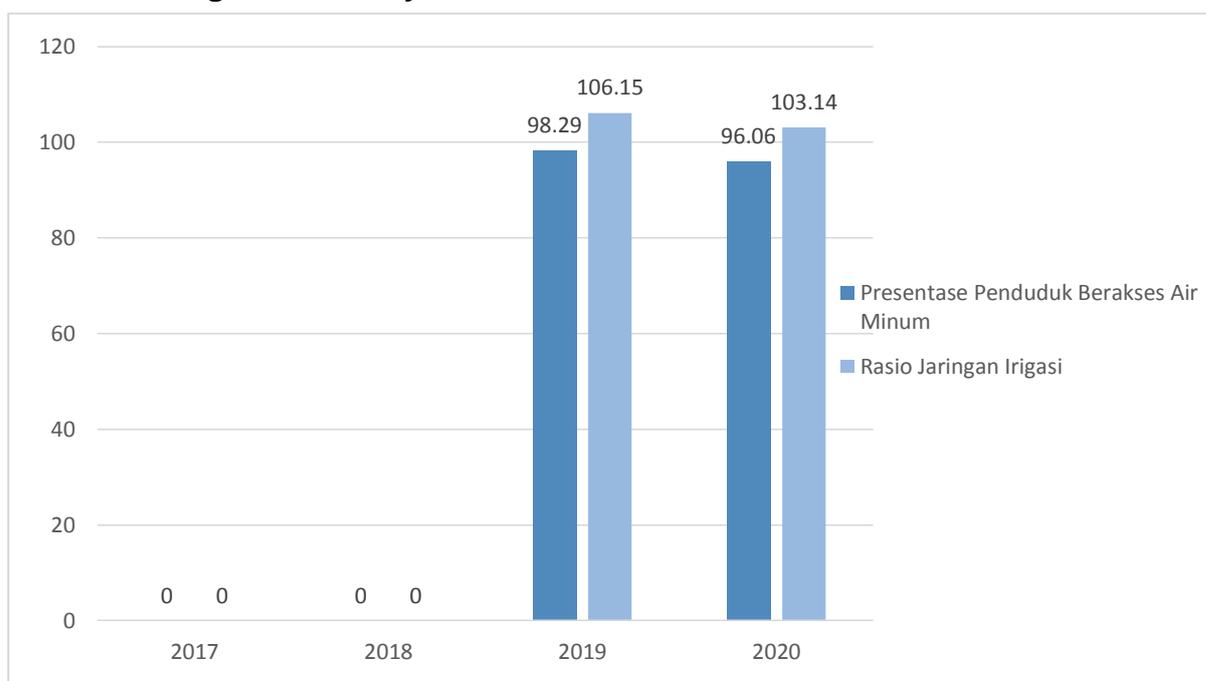
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Presentase Penduduk Berakses Air Minum	-	-	98,29	96,06
2	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	106,15	103,14

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Presentase Penduduk Berakses Air Minum dan Rasio Jaringan Irigasi cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data perbandingan di tahun 2017 dan 2018 tidak terdeteksi dikarenakan kedua indicator dari capaian kinerja tersebut baru ditetapkan di tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 pemerintah daerah kabupaten luwu berada dalam masa transisi pada aspek dokumen perencanaan dan kepemimpinan kepala daerah baru. Sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.8

### Grafik capaian kinerja Sasaran

#### “Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar”



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : (1) Presentase Penduduk Berakses Air Minum; dan (2) Rasio Jaringan Irigasi;

Indikator Presentase Penduduk Berakses Air Minum mengalami penurunan di tahun 2020 karena dibandingkan tahun 2019, dikarenakan adanya faktor masa transisi RPJMD yang tentunya berdampak pada

penetapan target sasaran pada Indikator Kinerja Utama. Dimana pada tahun 2019 indikator sasaran sedikit lebih rendah dibandingkan penetapan target indicator di tahun 2020. Sama halnya pada indicator rasio jaringan irigasi, meskipun capaian kinerjanya mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya masa transisi dokumen perencanaan.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar adalah sebanyak 3 program dan 12 kegiatan, yaitu: (1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sebanyak 1 Kegiatan; (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Pengairan Lainnya sebanyak 7 Kegiatan; dan (3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum sebanyak 4 kegiatan.

### 3.3 Sasaran III: Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman

- a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.17

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan PSU Lingkungan Kawasan Permukiman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	76,00	76,00	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam Meningkatkan PSU Lingkungan Kawasan Permukiman berjalan dengan baik. Sebagaimana capaian dari kinerjanya mencapai 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

*Tabel 3.18*

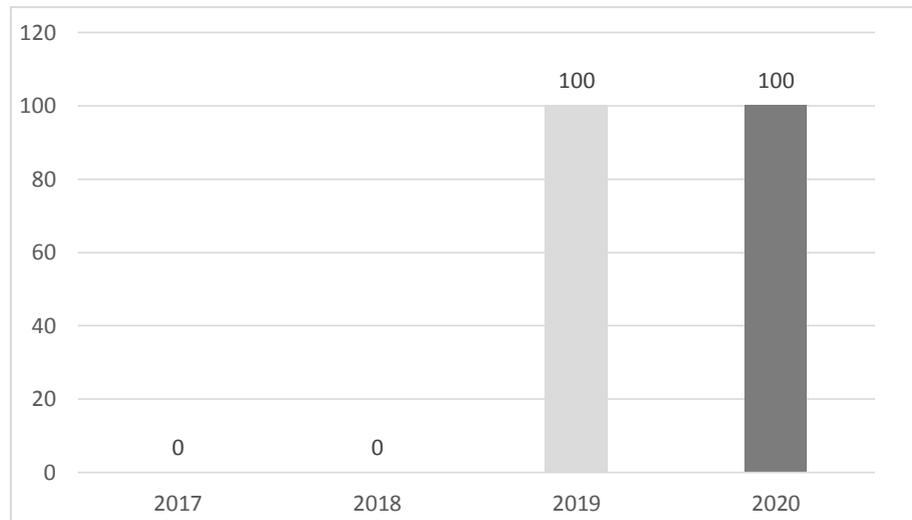
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	-	-	100	100

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Meningkatkan PSU Lingkungan Kawasan Permukiman berjalan dengan baik. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerjanya secara konsisten bertahan di angka capaian 100%. Untuk tahun 2017 dan 2018 keadaan capaian indicator tidak dapat digambarkan karena pada tahun tersebut belum ditetapkan indicator capaian kinerja pemerintah kabupaten luwu. Mengingat di tahun 2019 adalah masa transisi dokumen perencanaan pemerintah kabupaten luwu dan pergantian kepala daerah yang baru. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada table berikut:

Gambar 3.9

**Grafik capaian kinerja Sasaran**  
**“Meningkatkan PSU Lingkungan Kawasan Permukiman”**



- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatkan PSU Lingkungan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak;

Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak meskipun dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang tercapai sesuai target. Namun ada beberapa aspek-aspek pembangunan sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih yang belum memiliki perencanaan terpadu dan belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sehingga untuk Untuk lebih meningkatkan capaian indikator tersebut diatas dan demi pencapaian kinerja yang lebih baik, kiranya perlu penyusunan perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar adalah sebanyak 1 program dan 9 kegiatan, yaitu: Program Pembangunan dan Penataan PSU;

#### 4. Capaian Kinerja Misi 4: Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Sasaran yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

##### 4.1 Sasaran I: Meningkatnya pendapatan masyarakat

###### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat” pada misi “Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.19

##### Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita (Juta Rp.)	(Juta Rp.)	38,03	43,96	115,6
	Indeks Gini	Indeks	0,360	0,352	102,2
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>108,2</b>

Mengamati tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator PDRB Perkapita mengalami kenaikan yang signifikan karena melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 115,6% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Sama

halnya dengan indikator Indeks Gini yang mengukur ketidakmerataan penduduk atau ketimpangan agregat juga mengalami penurunan yang cukup baik, data ini dipahami semakin rendah maka semakin baik. Dengan perolehan capaian kinerja 102,2% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Secara umum sasaran ini tercapai dengan capaian kinerja 108,2%.

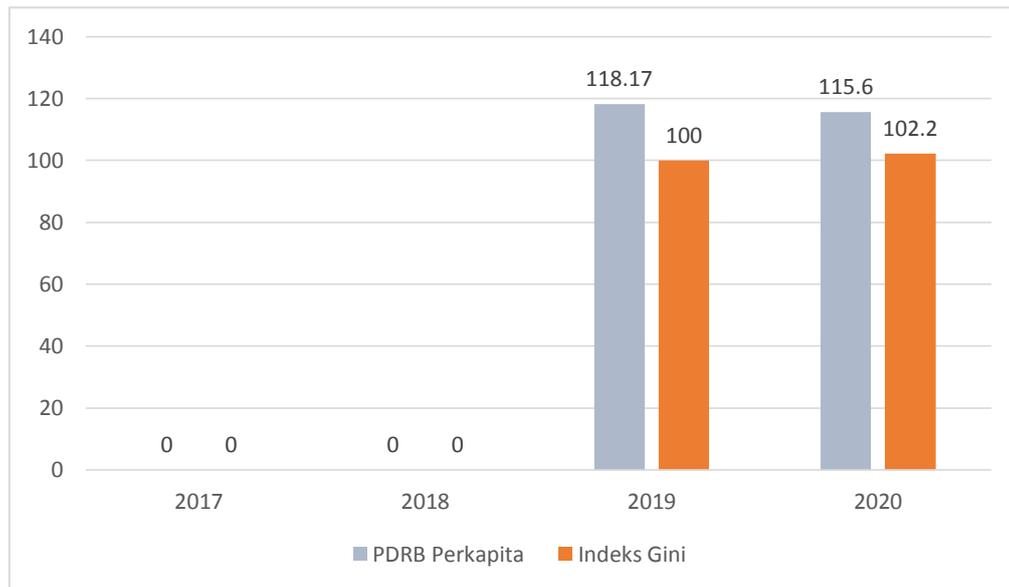
*Tabel 3.20*

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	PDRB Perkapita (Juta Rp.)	-	-	118,17	115,6
2.	Indeks Gini			100	102,2

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat ini berjalan dengan baik. Dari data capaian kinerja yang diperoleh dari tahun sebelumnya juga menampilkan data yang menandakan bahwa indikator tersebut berjalan dengan baik. Meskipun capaian kinerja tahun sebelumnya lebih tinggi namun hal tersebut tidak berarti bahwa mengalami penurunan. Karena tahun sebelumnya dan tahun 2020 sama-sama menunjukka data mencapai target dan melebihi target yang telah di tetapkan sebelumnya. Untuk tahun 2017 dan 2018 tidak disajikan data karena pada tahun kedua indikator capaian belum ditetapkan pada IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.10

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat”**

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu: 1) PDRB Perkapita (Juta Rp.); 2) Indeks Gini;

Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) erupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB dapat disajikan dalam bentuk perkapita untuk mengetahui gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Apabila melihat data pada table 3.20, data PDRB perkapita kabupaten luwu cenderung naik dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya capaian kinerja tersebut:

1. Tingginya transaksi dan kegiatan perekonomian di wilayah kabupaten luwu, hal ini ditandaipula dengan bertumbuhnya UMKM Café yang menawarkan konspep estetika untuk “*nongkrong*”, tumbuhnya food court yang menawarkan macam-macam jajanan dan bertumbuhnya gerai minuman yang menawarkan minuman-minuman authentic.

2. Budaya jual beli *online* juga mempengaruhi meningkatnya pendapatan perkapita, hal ini dikarenakan jual beli online sudah bisa dilakukan oleh semua orang dalam wilayah kabupaten luwu.
3. Besarnya jumlah penduduk juga turut mempengaruhi naiknya capaian kinerja dari PDRB Perkapita;

Indikator Indeks Gini menggambarkan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan secara keseluruhan pada sebuah bidang dalam hal ini pendapatan dari masyarakat. Apabila melihat capaian kinerja terhadap indikator indeks Gini, dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu mencapai kinerja yang baik karena berhasil masuk ke tingkat koefisien moderat (sedang) dengan nilai 0,352. Adapun yang mempengaruhi tingkat capaian tersebut:

1. Peran aktif pemerintah untuk hadir membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi;
  2. Dilakukannya Refocusing anggaran pemerintah untuk memberikan pemulihan ekonomi masyarakat;
- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ini adalah sebanyak 4 program dan 6 kegiatan, yaitu: Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro 2 kegiatan dan Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 kegiatan;

## 4.2 Sasaran II: Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah

### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah” pada misi “Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.21

**Capaian Kinerja Sasaran “Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah”**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Objek Wisata	1	0	0
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>0</b>

Mengamati tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, tidak berjalan dengan baik, karena dari data capaian kinerjanya hanya menunjukkan capaian 0% dengan kategory “Sangat Rendah”.

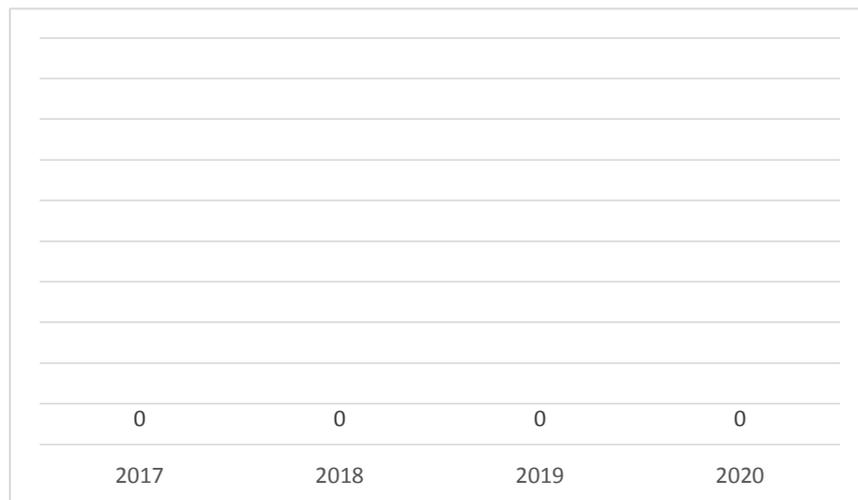
*Tabel 3.22*

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	-	-	0	0

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah ini tidak mengalami perubahan yang berarti belum ada kinerja yang dihasilkan, sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3.11

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah”**

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya pengembangan Destinasi Wisata Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan

Berdasarkan data kinerja yang diperoleh, jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan dikabupaten luwu pada tahun 2020 tidak ada atau dengan kata lain tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena:

1. Aspek anggaran yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengembangan destinasi wisata unggulan;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang pariwisata untuk mengembangkan wisata unggulan;

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah ini adalah sebanyak 0 program dan 0 kegiatan, yang artinya pada tahun 2020 tidak terdapat program dan anggaran untuk mengembangkan destinasi wisata unggulan.

### 4.3 Sasaran III: Menurunnya Jumlah Pengangguran

#### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Menurunnya Jumlah Pengangguran” pada misi “Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.23

#### Capaian Kinerja Sasaran “Menurunnya Jumlah Pengangguran”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,38	4,94	87,21
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>87,21</b>

Mengamati tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, telah berjalan dengan baik, karena dari data capaian kinerjanya sebesar 87,21% dengan katategori “Tinggi”.

Tabel 3.24

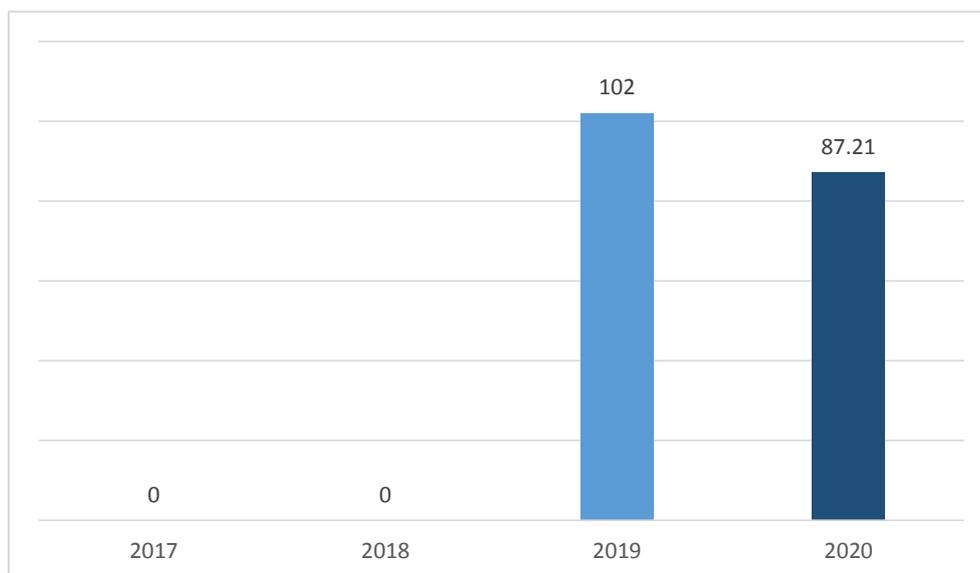
#### Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	102	87,21

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka ini mengalami pencapaian yang baik. Perlu dipahami bahwa, indikator ini adalah semakin kecil presentasi capaian kinerja semakin baik dibandingkan presentasi capaian kinerja besar. Dari data diatas dapat dipahami bahwa tingkat pengangguran di tahun 2020 sudah mulai menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan menandakan bahwa berjalan dengan

baik. Sementara untuk tahun 2017 dan 2018 perlu kami sampaikan bahwa data pencapaian tidak bisa dideteksi karena tahun 2019 merupakan tahun transisi dokumen perencanaan, (RPJMD) kabupaten luwu. sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

*Gambar 3.12*  
**Grafik capaian kinerja Sasaran “Menurunnya Jumlah Pengangguran”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya penurunan Jumlah Pengangguran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka;

Berdasarkan data kinerja yang diperoleh, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 sudah berjalan dengan baik. Namun belum mencapai penurunan yang signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 setelah di umumkannya penyebaran kasus Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan sosial. Sehingga berdampak tidak baik pula kepada perusahaan/pelaku ekonomi dan pekerjanya. Dimana pelaku ekonomi dipaksa untuk mem-PHK karyawannya dikarenakan tidak stabilnya perputaran ekonomi dan kesulitan untuk membayar kariawannya.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Mengembangkan Destinasi Wisata Daerah ini adalah sebanyak 1 program dan 3 kegiatan, yaitu program Perluasan Kesempatan Kerja.

## 5. Capaian Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 (Satu) Sasaran yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### 5.1 Sasaran I: Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis

#### a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis” pada misi “Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.25

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	%	7,20	0,32	4,4
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>4,4</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami tidak berjalan dengan baik. Dikarena presentase capaian dari kinerjanya hanya 4,4% dan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator sasaran ini masuk kategori capaian kinerja “Sangat Rendah”;

Tabel 3.26

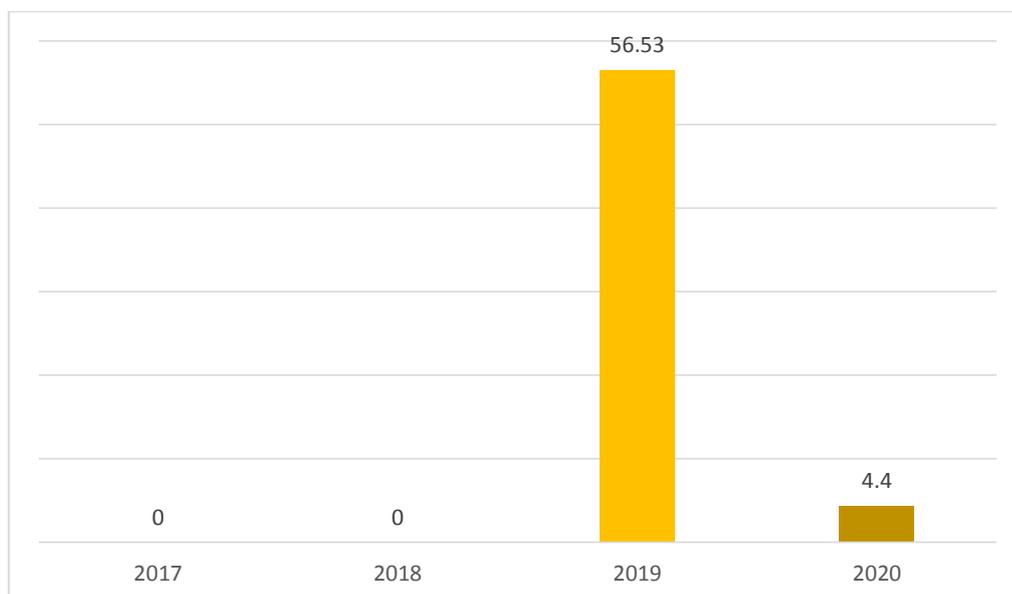
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	-	-	56,53	4,4

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3.13

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%);

Sebagaimana data yang tersaji pada gambar 3.13. Dapat dipahami bahwa laju pertumbuhan PDRB di tahun 2020 mengalami penurunan drastis yaitu 52,13% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena menurunnya sumbangan yang diberikan oleh sektor pertanian yang ada di Kabupaten Luwu terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu di tahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh pengaruh cuaca dan tingkat curah hujan yang tinggi di tahun 2020 di masa pertumbuhan tanaman petani, sehingga juga mengakibatkan adanya gagal panen dan kualitas yang kurang baik terhadap hasil pertanian. Hal tersebut tentunya mengurangi harga di pasaran. Selain itu, penurunan ini juga turut dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 sebagai bencana Nasional yang juga turut mengancam perekonomian.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis ini adalah sebanyak 2 program dan 7 kegiatan, yaitu: program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan 7 kegiatan.

## **6. Capaian Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius**

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 (satu) Sasaran yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

## 6.1 Sasaran: Meningkatnya Upaya Penyebarluasan Ajaran Agama

### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Upaya Penyebarluasan Ajaran Agama” pada misi “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Upaya Penyebarluasan Ajaran Agama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Upaya Penyebarluasan Ajaran Agama	Jumlah kader mubaligh muda (orang)	Orang	40	0	0
	Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	%	27,50	0	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>50</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator Jumlah Kader Mubaligh Muda tidak berjalan dengan baik, sebagaimana data dari capaian kinerjanya yang tidak menunjukkan presentase atau 0% dengan kategori “Sangat Rendah”. Sedangkan Indikator Presentase kasus suap, penipuan dan penggelapan di tahun 2020 tidak ada ditemukan kasus suap, penipuan dan penggelapan sehingga presentasinya 0%.

Tabel 3.28

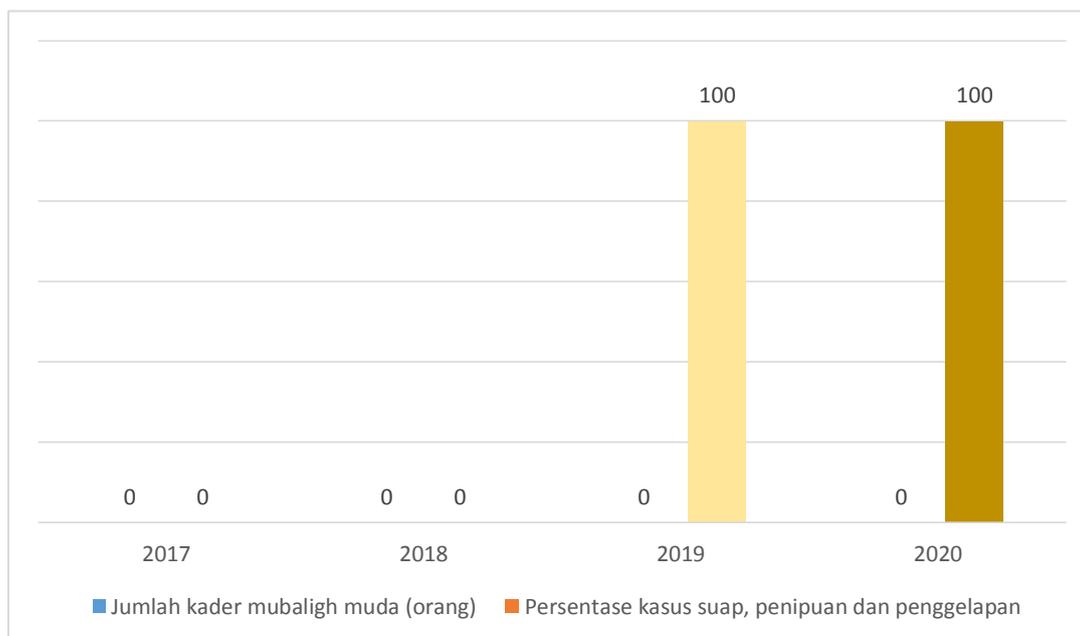
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kader mubaligh muda (orang)	-	-	0	0
2.	Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	-	-	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, untuk Indikator Jumlah Kader Mubaligh Muda tidak menunjukkan adanya kinerja, karena dari data capaian kinerja yang dihasilkan di tahun 2020 adalah 0% dengan kategori “Sangat Rendah”. Sedangkan untuk Indikator Presentase kasus suap, penipuan dan penggelapan di tahun 2020 tidak ditemukan, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.14

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Upaya Penyebarluasan Ajaran Agama”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Meningkatnya Upaya Penyebarluasan Ajaran Agama terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah kader mubaligh muda (orang), (2) Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan.

Salah satu upaya untuk memperteguh kondisi masyarakat yang religius ialah dengan melakukan penyebarluasan ajaran agama oleh paa mubaligh/mubalighah. Belum terealisasi dengan baiknya indikator capaian jumlah kader mubaligh ini dipengaruhi oleh beberapa kendala:

1. Belum adanya prioritas anggaran yang akan mendukung pelaksanaan pengkaderan mubaligh;
2. Kurangnya partisipasi dari stakeholder terkait seperti ormas-ormas keagamaan dalam membantu penyediaan kader mubaligh.
3. Melihat perkembangan teknologi sekarang ini, penyebarluasan agama bisa juga dilakukan melalui media-media sosial, sehingga membuat indikator ini dijadikan prioritas untuk tahun selanjutnya;

Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten luwu tetap berkomitmen untuk melaksanakan pencapaian kinerja ini dengan mulai menganggarkan untuk pelaksanaannya di 2021.

Kemudian untuk Indikator Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikarenakan masih kurangnya kesadaran hukum. Selain itu turut juga dipengaruhi oleh beberapa aspek sosial, ekonomi dan politik.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Upaya Penyebarluasan Ajaran Agama ini adalah sebanyak 2 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Program Peningkatan Kapasitas Legislasi;

## 7. Capaian Misi 7: Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 (satu) Sasaran yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### 7.1 Sasaran: Berkembangnya Perekonomian Desa

#### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Berkembangnya Perekonomian Desa” pada misi “Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3.29*

#### Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Perekonomian Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Berkembangnya Perekonomian Desa	Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	%	0	0	0
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>0</b>

Jika melihat capaian indikator yang mendukung sasaran berkembangnya perekonomian desa di atas, kita memahami bahwa tidak ada capaian dari kinerja. Namun, sebenarnya kinerja tersebut bernilai 0% karena memang pada dokumen perencanaan ditetapkan target 0. Sehingga capaian kinerja tahun 2020 belum dapat dilaksanakan pengukuran karena tidak ditargetkan. Tetapi apabila melihat dari aspek pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan, kinerja ini mencapai target 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

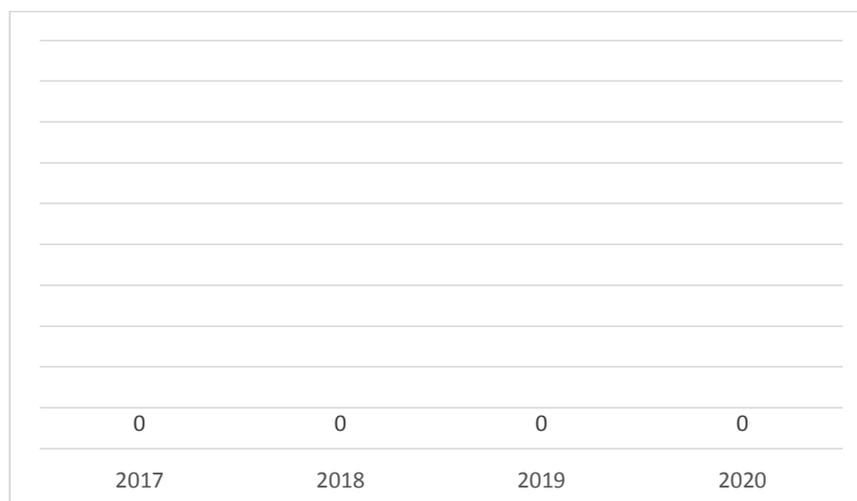
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	-	-	0	0

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Berkembangnya Perekonomian Desa belum berjan. Namun menjadi catatan belum berjalannya kinerja dari indikator tersebut karena di tahun 2019 dan 2020 ditetapkan target dari capainnya yaitu 0. Sementara untuk tahun 2017 dan 2018 tidak ditampilkan data karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2019 dalam dokumen perencanaan yang baru, seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini:

*Gambar 3.15*

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Berkembangnya Perekonomian Desa”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berkembangnya Perekonomian Desa terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: 1) Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)

Indikator ini belum dapat dilakukan penilaian terhadap kinerjanya dikarenakan indikator ini pada dokumen perencanaan belum ditetapkan target, dimana pada RPJMD target yang ditetapkan di tahun 2020 adalah 0. Sehingga memang belum dapat dilakukan penilaian kinerja.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Berkembangnya Perekonomian Desa ini adalah sebanyak 0 program karena belum ditetapkan pada rencana pembangunan.

## 8. Capaian Misi 8: Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 (Satu) Sasaran yang terdiri dari 2 (satu) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### Sasaran I: Meningkatnya realisasi investasi

- a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya realisasi investasi” pada misi “Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.30

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya realisasi investasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	Perusahaan	13	16	123,1
	Persentase	% Jumlah	1,00	0,28	28

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	wirausaha muda	Penduduk			
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>75,55</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, Indikator Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi mampu memberikan capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 123,1% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Sedangkan indikator Persentase wirausaha muda belum mampu mencapai target, dimana pencapaian kinerjanya hanya mencapai 28% dengan kategori “Sangat Rendah”. Sehingga secara umum pencapaian kinerja dari sasaran ini sebesar 75,55%.

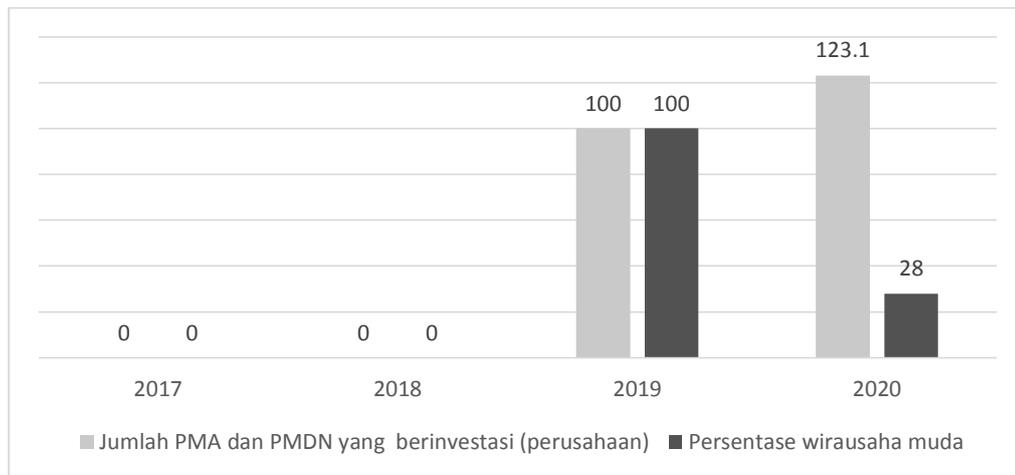
*Tabel 3.31*

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	-	-	100	123,1
2	Persentase wirausaha muda	-	-	100	28

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya realisasi investasi ini mengalami peningkatan dan penurunan. Indikator Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari capaian kinerjanya yaitu sebesar 23,1%, sedangkan untuk indikator Persentase wirausaha muda mengalami penurunan capaian kinerja, yaitu sebesar 72%. Sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3.16

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya realisasi investasi**

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya realisasi investasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : (1) Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan); (2) Persentase wirausaha muda;

Indikator Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan) dari data yang tersaji telah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja yang melebihi target. Hal ini sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten luwu. Kabupaten luwu memiliki potensi baik itu di sektor pariwisata maupun pertambangan. Namun, untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam ketertarikan investor berinvestasi di Kabupaten Luwu pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menangkap peluang tersebut dengan memperbaiki penatausahaan administrasi perizinan, memberikan kepastian hukum dan meningkatkan infrastruktur pendukung.

Sementara untuk indikator Persentase wirausaha muda tidak menunjukkan hasil kinerja baik karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Terjadinya hal demikian dikarenakan belum optimalnya pendataan terhadap wirausaha muda dan disisi lain tidak adanya partisipasi dari para pengusaha muda untuk mendaftarkan perusahaannya atau mengurus perizinan berwirausaha, karena secara nyata saat ini kabupaten luwu telah diramalkan oleh gerai-

gerai yang menawarkan jajanan ringan dan juga minuman-minuman authentic yang memberikan daya tarik pertumbuhan ekonomi. Seharusnya para pelaku usaha tersebut di data karena di dominasi oleh anak-anak muda.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya realisasi investasi ini adalah sebanyak 1 program yaitu: Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan.

## 9. Capaian Misi 9: Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 (Tigas) Sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### 9.1 Sasaran I: Meningkatkan Produk Hukum Daerah

- a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Produk Hukum Daerah” pada misi “Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.32

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Produk Hukum Daerah	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	%	80,00	80	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata – rata capaian kinerja					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa tercapai dengan baik. Capaian kinerja 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.33

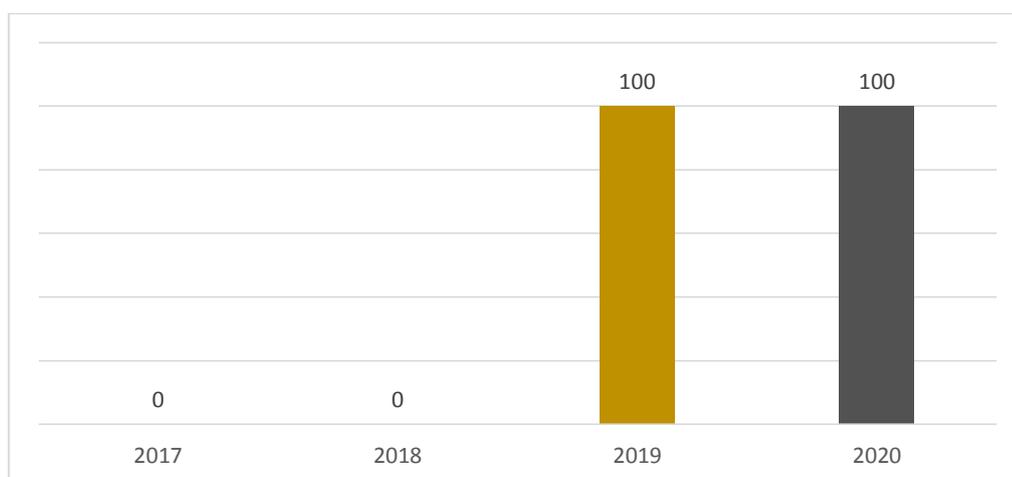
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	-	-	100	100

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran ini berjalan dengan baik dan dipertahankan pada capaian kinerja 100%, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.17

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah**



b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan

/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan Produk Hukum Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%);

Indikator cakupan ketersediaan produk hukum daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan. Dari capaian kinerja yang tersaji, produk hukum daerah kabupaten luwu mencapai 100%. Ada beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari produk hukum daerah:

1. Adanya kesadaran hukum yang ditanamkan kepada Aparatur;
2. Meningkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum terhadap masyarakat;

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah ini adalah sebanyak 3 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Kepastian Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyarakat;

## **9.2 Sasaran II: Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosia**

- a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosia” pada misi “Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik” dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Tabel 3.34*

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosia**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosia	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa telah berjalan dengan baik. Karena melihat data capaian kerjanya yang telah mencapai 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

*Tabel 3.35*

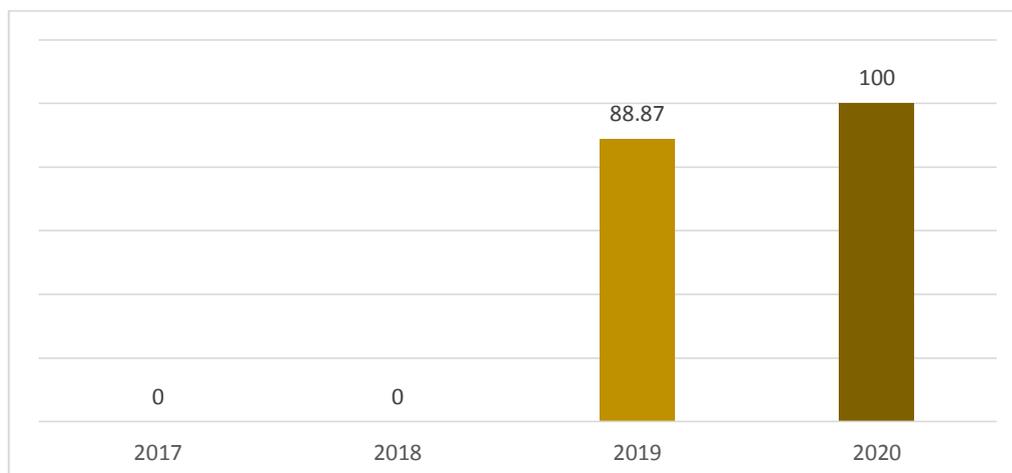
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	-	88,87	100

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja pada indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 11,13%, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

*Gambar 3.18*

### Grafik Capaian Kinerja Sasaran Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosia terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Indikator Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dari hasil capaian kerjanya dapat dipahami telah berjalan dengan baik. Sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk lebih baik. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja ini beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Menertibkan regulasi bidang kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme pegawai.
2. Meningkatkan Jumlah dan mutu pelayan kesejahteraan sosial pada PMKS;
3. Memperluas cakupan sosialisasi dan capacity building terhadap masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang

masalah sosia ini adalah sebanyak 3 program dan 9 kegiatan, yaitu: Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5 Kegiatan, Program Terciptanya Peningkatan Mutu Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2 kegiatan dan Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2 Kegiatan.

### 9.3 Sasaran III: Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

#### a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak” pada misi “Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.36

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,90	55,89	90,29
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>90,29</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, Dapat dipahami bahwa capaian kinerja dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender mencapai 90,29 % dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang berarti telah berjalan dengan baik.

Tabel 3.37

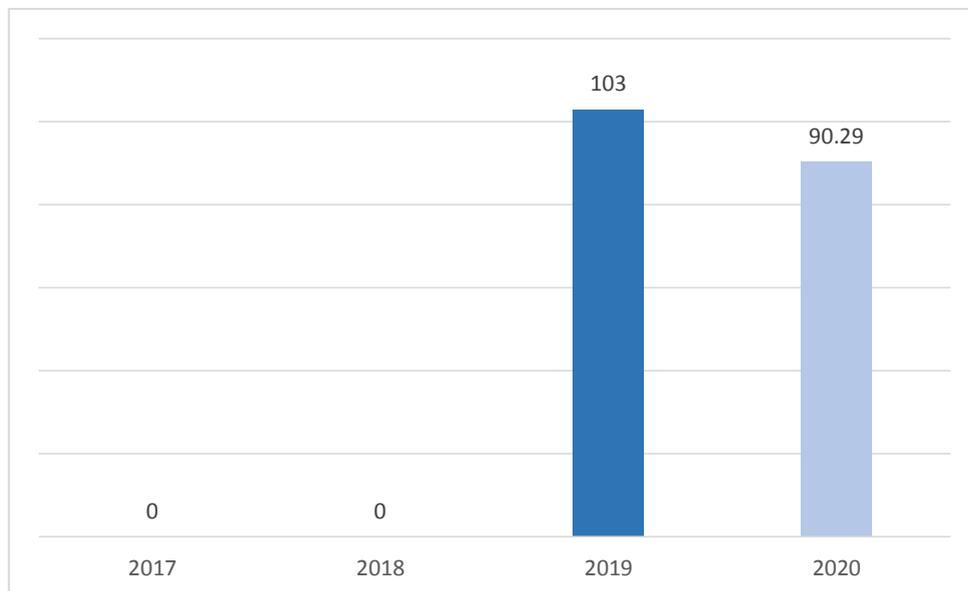
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender	-	-	103	90,29

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan terhadap capaian kinerja pemberdayaan gender sebesar 12,71%. Sementara untuk tahun 2017-2018 tidak dapat ditampilkan data karena pada tahun tersebut belum ditetapkan indikator indeks pemberdayaan gender belum dimasukkan ke dalam IKU, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.19

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Indeks Pemberdayaan Gender;

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Apabila melihat capaian kinerja sebagaimana yang tersaji pada gambar 3.19, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan capaian kinerja. Hal ini bisa dipengaruhi oleh:

1. Berkurangnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen atau DPRD Kab. Luwu;
2. Kurangnya keterlibatan Perempuan pada proporsi pengambilan kebijakan dalam bidang pemerintahan;
3. Mayoritas yang menghasilkan uang masih didominasi oleh laki-laki.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini adalah sebanyak 1 program dan 3 kegiatan, yaitu: program peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga.

## **10. Capaian Misi 10: Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana**

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (Dua) Sasaran yang terdiri dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### **10.1 Sasaran I: Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

- a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” pada misi “Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.38

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	%	50,00	45,00	90
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>90</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa capaian kinerja indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH telah mencapai kinerja 90% dengan kategori “Tinggi”

Tabel 3.39

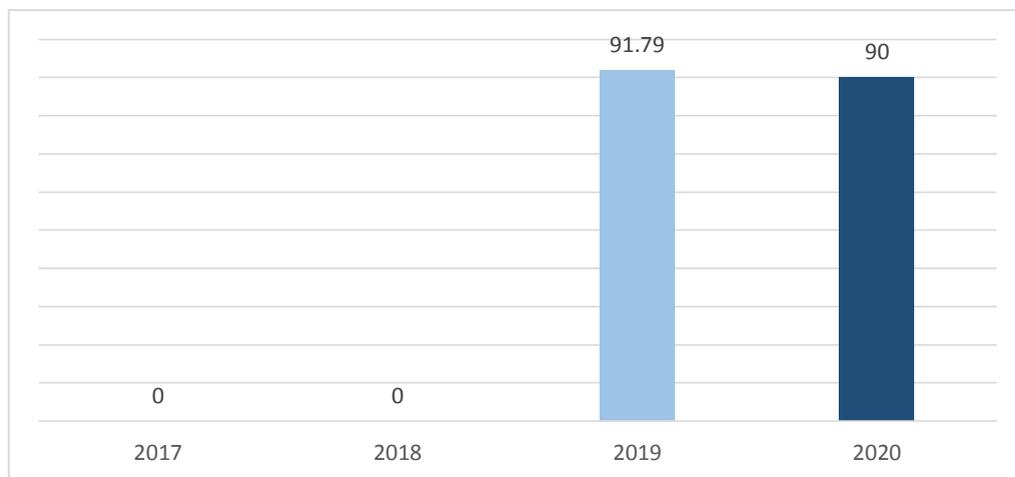
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	-	-	91,79	90,00

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan menggambarkan pencapaian yang sangat baik, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

*Gambar 3.20*

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%);

Indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%) dari data yang tersaji pada gambar 3.20 mengalami penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja indikator tersebut, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kompetensi sumber daya manusia, anggaran dan sarana-prasarana.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah sebanyak 1 program yaitu: program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas).

## 10.2 Sasaran II: Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana

- a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana” pada misi “Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.40

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	%	30,00	30,00	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa capaian kinerja dari indikator ini adalah 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.41

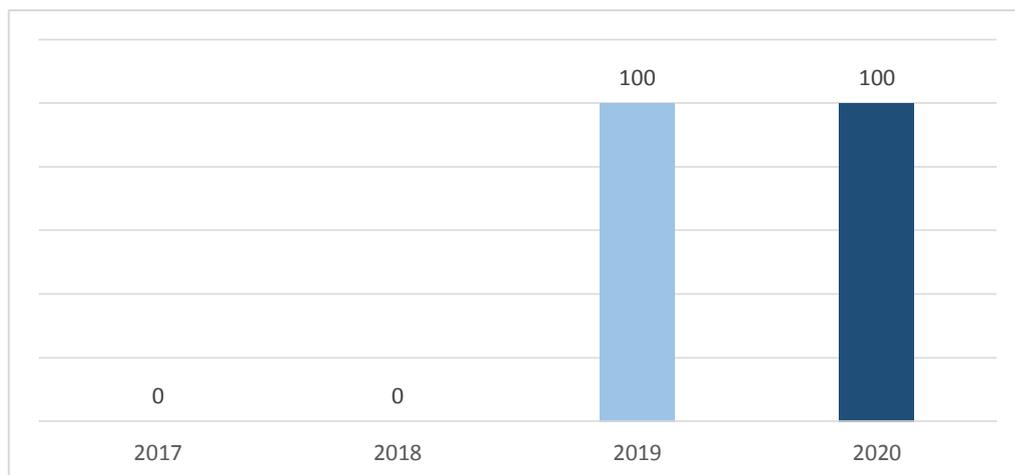
**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)			100	100

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran berjalan secara konsisten, sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.21

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Capainya dari indikator ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan bencana seperti Hidrologi, Meteorologi, dan iklim. Namun, ada juga faktor yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, seperti manusia tidak dapat memahami suatu risiko menjadi bahaya, keterkaitan kerentanan alam dengan pemanasan global,

ketidakberdayaan manusia menyikapi bencana alam, dan ketidaksiediaan atau masih kurangnya system peringatan dini yang dapat bekerja dengan lebih baik.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana terdiri ini adalah sebanyak 3 Program yaitu: Program Pengendalian Kesiapsiagaan Penangan Penanggulangan Bencana, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan untuk mencapai terciptanya kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud tersebut, diperlukan dukungan dana yang memadai, yang dikelola oleh sumber daya aparatur yang profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi dengan pengimplementasian sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi logis semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu senantiasa mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengelolaan pemungutan PAD masuk



kedalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri dan tidak sebagaimana Dana Perimbangan yang lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, olehnya itu diharapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, serta proses yang sederhana dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatutan, potensi dan karakteristik daerah, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42

#### Realisasi Pendapat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2019	Realisasi 2020
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 113.777.210.000</b>	<b>Rp 123.162.255.946,09</b>
1.1.1	Pajak Daerah	Rp 25.548.760.000	Rp 23.593.714.129,60
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 7.568.410.000	Rp 6.654.175.568,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 5.462.260.000	Rp 5.220.161.952,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 75.197.780.000	Rp 87.694.204.296,49
<b>1.2</b>	<b>Dana Transfer</b>	<b>Rp 1.043.484.270.000</b>	<b>Rp 1.208.907.388.326,62</b>
1.2.1	Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Rp 13.831.260.000	Rp 12.341.107.623,00
1.2.2	Dana alokasi umum	Rp 718.676.590.000	Rp 652.082.657.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	Rp 310.976.420.000	Rp 273.535.661.290,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>Rp 307.823.740.000</b>	<b>Rp 119.896.523.580,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	Rp 49.417.150.000	Rp 86.083.204.580,00
1.3.2	Dana Darurat		
1.3.3	Bagi hasil pajak dan provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	Rp 55.518.010.000	Rp 29.012.328.779,00

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2019	Realisasi 2020
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp 195.242.490.000	Rp 220.436.237.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	Rp 764.610.000	Rp 17.723.334.172,62
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp1.465.085.220.000</b>	<b>Rp 1.451.966.167.852,71</b>

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2020, Pendapatan Daerah mencapai **Rp 1.451.966.167.852,71**.

## 2. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2020 telah merencanakan Belanja Daerah sesuai dengan urgensi capaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang terumuat didokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang menjabarkan bahwa arah kebijakan Belanja Daerah berfokus pada:

- a) Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- b) Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana
- c) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penguatan Kelembagaan
- d) Lain-lain dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

Adapun struktur belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.43

**Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020**

No	Uraian	Realisasi 2020
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	1.122.280.889.266,30
2.1.1	Belanja Pegawai	523.279.759.914,00
2.1.2	Belanja Barang	293.506.221.876,30
2.1.5	Belanja Hibah	44.001.424.476,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	988.036.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	260.505.447.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	286.351.885.895,00
2.2.1	Belanja Tanah	228.592.550,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	49.722.400.159,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	60.253.228.410,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.180.178.739,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	33.967.486.037,00
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	7.769.105.207,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.769.105.207,00
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>	2.650.339.416,00
<b>Total Belanja</b>		<b>1.419.052.219.784,30</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi komponen Belanja pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.419.052.219.784,30 dimana angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 29.136.080.216 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2019. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah kedepannya agar mampu mengoptimalkan capaian kinerja mengingat komponen Belanja Daerah cenderung berkurang tiap tahunnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024, dokumen RKPD 2020, Review IKU Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 serta Perubahan Perjanjian Kinerja 2020. Dalam laporan ini mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang terdiri atas 10 Misi dan 20 sasaran. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi pada RPJMD dikategorikan **Baik**. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
7. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar
8. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman
9. Meningkatnya pendapatan masyarakat
10. Mengembangkan destinasi wisata daerah
11. Menurunnya jumlah pengangguran
12. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis
13. Meningkatnya upaya penyebarluasan ajaran agama
14. Berkembangnya Perekonomian Desa
15. Meningkatnya realisasi investasi
16. Meningkatkan produk hukum daerah
17. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial
18. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
19. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

20. Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana

## 2. LANGKAH PERBAIKAN

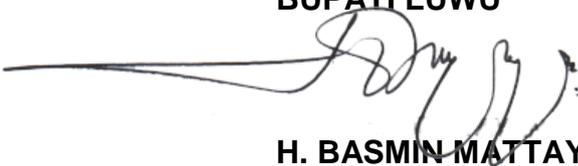
Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Review RPJMD
2. Review Renstra OPD
3. Penyusunan RKPD 2021
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan disesuaikan dengan program prioritas mengacu kepada Visi dan Misi Bupati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu.

Belopa, 17 Maret 2021

**BUPATI LUWU**



**H. BASMIN MATTAYANG**